

Terbit : 29 November 2023

# Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia

<sup>1</sup>Muana Nanga, <sup>2</sup>Adrianus Kabubu Hudang

<sup>1</sup>Universitas Pradita Serpong Tangerang, <sup>2</sup>Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

[1muanananga@pradita.ac.id](mailto:muanananga@pradita.ac.id), [2adrianus@unkriswina.ac.id](mailto:adrianus@unkriswina.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah menganalisis dampak dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal yang telah dilakukan Indonesia selama ini diharapkan telah membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengetahui sejauh mana dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan data time series(1985-2014) dan dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda (multiple regression model) dan diestimasi dengan metode ordinary least squares (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti memiliki dampak yang positif atau eksponsif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, desentralisasi fiskal ternyata cenderung berdampak negatif atau kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Indonesia, Model Regresi Berganda, Pertumbuhan Ekonomi Daerah

## PENDAHULUAN

Pada akhir dasawarsa 1970-an hingga awal dasawarsa 1980-an, perekonomian dunia dilanda kemerosotan ekonomi (resesi ekonomi) yang cukup serius. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara di dunia, baik negara-negara maju maupun negara sedang berkembang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam upaya untuk merespons kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan itu, banyak negara berusaha untuk melakukan reformasi di dalam kebijakan ekonomi mereka.

Desentralisasi fiskal dilihat sebagai salah satu upaya kearah tersebut, dan mulailah berbagai negara di berbagai belahan dunia melakukan desentralisasi fiskal dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka yang terpuruk akibat resesi ekonomi yang terjadi. Singkat kata, desentralisasi fiskal atau devolusi kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat atau nasional kepada pemerintah daerah (subnasional) dilihat sebagai bagian dari suatu paket reformasi untuk meningkatkan efisiensi terutama di sektor publik, untuk meningkatkan persaingan diantara pemerintah daerah (*interjurisdictional competition*) di dalam menyampaikan (*delivering*) berbagai layanan publik dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992; Bird dan Wallich, 1993).Dengan kata lain, desentralisasi fiskal selama ini telah dilihat sebagai suatu sarana atau alat (*a means*) untuk meningkatkan efisiensi dari pemerintah dan untuk mendorong perkembangan dan per-tumbuhan ekonomi (Davoodi, 1998).

Argumen ekonomi untuk mendukung desentralisasi fiskal didasarkan atas dua asumsi dasar yang saling melengkapi, yaitu: (1) bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah akan berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah pusat atau nasional untuk menyampaikan layanan-layanan publik (*public services*) sebagai akibat dari keunggulan informasi (*informational advantage*); dan (2) mobilitas penduduk dan persaingan diantara pemerintah daerah untuk menyampaikan layanan publik akan menjamin pemenuhan preferensi dari komunitas lokal dan pemerintah lokal.



Di Indonesia sendiri, kebijakan desentralisasi fiskal secara resmi mulai diluncurkan pemerintah pada awal tahun 2001 lalu, yang didahului dengan keluarnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yaitu UU nomor 22 dan 23 tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU nomor 32 dan 33 tahun 2004, dan terakhir direvisi lagi dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal dilihat sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut.

Pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya dampak desentralisasi fiskal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sejumlah ahli telah melakukan penelitian untuk mengkaji dampak desentralisasi fiskal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah studi yang pernah dilakukan para ahli selama ini. *Pertama*, adalah studi yang dilakukan Zhang dan Zou (1999) dimana mereka menggunakan data panel untuk data panel untuk China dan mereka menemukan bahwa desentralisasi fiskal justru menurunkan pertumbuhan ekonomi provinsi. *Kedua*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Davoodi dan Zou (1998) untuk 46 negara sedang berkembang dan negara maju dan mencakup periode 1971-1989, dan mereka menemukan bahwa antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terdapat suatu hubungan yang negatif (*negative relationship*) untuk negara-negara sedang berkembang, tetapi tidak ditemukan adanya hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara maju. *Ketiga*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998), dan Xie, et al (1999), dimana mereka menggunakan data yang mencakup periode pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi baik di China dan Amerika Serikat (*United States*), dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal juga cenderung bersifat menghambat (*detrimental*) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, penelitian tentang desentralisasi fiskal terutama untuk melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan masih relatif sedikit atau terbatas. Penelitian tentang desentralisasi fiskal yang dilakukan di Indonesia selama ini lebih banyak dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan antar daerah atau provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena akan membahas tentang bagaimana dampak desentralisasi fiskal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Lebih detailnya, melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dilakukan selama ini telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah ataukah justru sebaliknya menjadi penghambat (*harmful*) pertumbuhan ekonomi daerah. Secara lebih detail, ingin mengetahui, membutuhkan *time lag* berapa tahunkah agar pengaruh dari kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih efektif.

## TINJAUAN PUSTAKA

Secara teoritis, issue tentang desentralisasi termasuk di dalamnya desentralisasi fiskal bukanlah sesuatu (hal) yang sama sekali baru. Charles M. Tiebout (1956) lewat bukunya yang berjudul *A Pure Theory of Public Expenditure*, mengemukakan model desentralisasi dengan teorinya yang dikenal dengan “*Decentralization Theorem*” merupakan ahli ekonomi pertama yang mencoba mengkaji tentang desentralisasi. Apa yang telah dirintis oleh Tiebout tersebut, kemudian diikuti oleh ahli-ahli ekonomi lainnya, seperti Richard A. Musgrave yang menulis buku berjudul *The Theory of Public Finance* (1959) di mana di dalam buku tersebut dibahas tentang peran atau fungsi pemerintah di dalam perekonomian seperti fungsi alokasi, fungsi redistribusi dan fungsi stabilisasi. Penulis lainnya adalah Wallace E. Oates yang menulis buku berjudul *Fiscal Federalism* (1972), dimana di dalam buku tersebut ia mendeskripsikan dengan sangat baik dan lengkap tentang federalisme fiskal (*fiscal federalism*) yaitu semacam desentralisasi fiskal untuk negara-negara yang menganut sistem pemerintahan federal<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Pendapat Wallace E. Oates tentang Fiscal Federalism dapat diikuti di dalam tulisannya yang berjudul “An Essay of Fiscal Federalism”, dimuat dalam *Journal of Economic Literature*, vol. ... No. 1999, hal. 1120-1149. Tinjauan teoritis tentang desentralisasi fiskal yang cukup lengkap dapat diikuti dalam tulisannya Robert A. Simanjuntak (2010) yang

Namun demikian, studi empirik tentang desentralisasi fiskal, terutama yang men-coba mengaitkan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, baru mulai marak dilakukan para ahli pada akhir tahun 1990-an. Hal ini sejalan dengan meningkatnya upaya reformasi ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang memburuk akibat resesi ekonomi dunia yang terjadi pertengahan 1990-an. Gemmell (2001), menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal tersebut merupakan suatu trend ekonomi politik, baik di negara maju maupun negara-negara sedang ber-kembang, terutama dalam dasawarsa 1990-an.

Studi-studi yang dilakukan para ahli sebagaimana dapat disimak dalam Tabel 2.1. sebagian besar merupakan studi lintas negara (*cross-country*) dan/atau studi lintas Provinsi (*cross-province*) di dalam suatu negara. Hanya sedikit sekali studi yang bersifat runtut waktu (*time-series*) untuk sebuah negara. Studi-studi yang bersifat lintas negara paling banyak dilakukan di negara-negara anggota OECD dan sejumlah negara sedang berkembang dan negara maju di luar anggota OECD. Dari berbagai studi lintas negara tersebut, ada yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi ada juga yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal itu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal tersebut tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi tidak terdapat hubungan atau korelasi satu dengan lainnya. Hal ini sangat tergantung dari ukuran yang digunakan untuk peubah desentralisasi fiskal, atau dari sisi mana desentralisasi fiskal itu dilihat. Apakah dari sisi pengeluaran atau dari sisi penerimaan atau pendapatan.

Sebagian besar dari studi lintas negara, baik yang dilakukan di negara-negara anggota OECD maupun di luar negara-negara anggota OECD menemukan bahwa ternyata desentralisasi fiskal tersebut cenderung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti temuan dari Ebel dan Yilmaz (2002), Behnisch (2003), Eller (2004), Iimi (2005), Martinez dan McNaab (2006), Rodriguez dan Kroijer (2009), Buser (2011), dan Slavinskaite (2017). Namun sebagian lainnya seperti studi yang dilakukan oleh Davoodi dan Zou (1998) untuk kasus negara-negara berkembang, Enikolopov dan Zhuravskaya (2003), Rodriguez dan Kroijer (2009), Rodriguez dan Ezcurra (2010), Baskaran dan Feld (2013), dan Gemmel et al (2013) menemukan bahwa desentralisasi fiskal tersebut berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada juga peneliti yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal itu ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditemukan oleh Davoodi dan Zou (1998) untuk kasus negara-negara maju, Woeller dan Phillips (1998) untuk kasus negara-negara sedang berkembang (LDCs), Feld, Baskaran dan Dede (2004), Bodman dan Ford (2006), Baskaran dan Feld (2009), Bodman (2011), dan Bodman (2013).

Studi-studi yang bersifat lintas Provinsi paling banyak dilakukan ahli di China dan di USA, dan temuan mereka juga berbeda-beda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, hal ini sangat tergantung pada ukuran yang digunakan untuk desentralisasi fiskal itu dan juga dari sisi mana desentralisasi fiskal tersebut dilihat. Beberapa studi lintas Provinsi yang dilakukan di China menemukan bahwa desentralisasi fiskal itu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti misalnya studi yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2000) dan Zhang dan Zou (2001). Sedangkan studi yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998) dan Zhang dan Zou (1998) menggunakan jumlah Provinsi yang sama yaitu masing-masing sebanyak 25 Provinsi, tetapi periode waktunya berbeda menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Studi lintas Provinsi atau negara bagian juga dilakukan di USA, antara oleh Yilmaz (2000), Akai dan Sakata (2002), serta Akai, Nishimura dan Sakata (2004) dan semuanya menemukan bahwa desentralisasi fiskal tersebut ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (USA).

Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi selama ini, dapat disimak lebih jauh melalui Tabel 2.1. berikut.

berjudul "Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Garnd Design di Indonesia", dalam majalah Prisma, Vol. 29, No. 3 Juli, hal. 35-57; dan Machfud Sidik (2007) dalam bukunya yang berjudul A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons from Indonesia's Experience, khususnya Chapter 3, hal. 97-142.



Tabel 2.1.: Berbagai studi empirik tentang kaitan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan para ahli (akhir 1990 – 2017)

<b>Studi</b>	<b>Negara</b>	<b>Periode</b>	<b>Metode</b>	<b>Temuan utama</b>
Davoodi dan Zou (1998)	46 negara berkembang dan negara maju	1970-1989 (rata-rata pertumbuhan di dalam output riil per kapita 5 dan 10 tahun)	Model Fixed Effect (FEM), Dummy waktu dan Unbalanced panel	Di negara maju tidak ditemukan adanya keterkaitan antara FD dan pertumbuh-an; sementara di negara berkembang kaitan antara FD dan pertumbuhan adalah negatif. Tingkat pajak rata-rata berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan.
Woeller dan Phillips (1998)	23 negara kurang berkembang (LDCS)	1974-1991	Model FEM dan OLS	Tidak ditemukan adanya kaitan yang kuat antara FD dan pertumbuhan ekonomi di LDCs
Zhang dan Zou (1998)	China (25 Provinsi)	1986 - 1992	Panel, One way fixed effects	Kaitan antara FD penge-luaran dan pertumbuhan ekonomi Provinsi di China adalah negatif.
Zhang dan Zou (1998)	China (25 Provinsi)	1980 - 1989	Panel dan FEM	Tingkat pajak Pusat dan Provinsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan tetapi tidak signifikan.
Xie, et al (1999)	Amerika Serikat	1948 - 1994	Time series	Pengeluaran pemerintah lokal cenderung berdampak menurunkan pertumbuhan, meskipun dengan tingkat signifikansi yang rendah. Pengeluaran negara bagian dikombinasikan dengan pengeluaran lokal adalah sangat tidak signifikan. Tingkat pajak rata-rata berdampak negatif, tetapi tidak signifikan.
Lin dan Liu (2000)	China (28 Provinsi)	1970 -1993	Panel data (FEM)	FD berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan

<b>Studi</b>	<b>Negara</b>	<b>Periode</b>	<b>Metode</b>	<b>Temuan utama</b>
Yilmaz (2000)	Unitary States (17)	1971 - 1990	FEM	FD pengeluaran pada tingkat lokal berdampak positif terhadap pertumbuhan GDP riil per kapita di negara-negara serikat daripada di negara-negara Federal. Desentralisasi pada tingkat regional ditemukan tidak signifikan.
Zhang dan Zou (2001)	China (29 Provinsi)	1987 - 1993	Panel data (FEM)	Hubungan antara FD dan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan
Ebel dan Yilmaz (2002)	6 negara-negara transisi	1997-1999	Bivariate OLS	Desentralisasi secara umum berhubungan secara positif dengan pertumbuhan
Akai dan Sakata (2002)	Jerman	1950 1990	Analisis Time Series	FD pengeluaran berkorelasi negatif dan signifikan dengan pertumbuhan.
Akai dan Sakata (2002)	USA (50 negara bagian)	1992 -1996	Cross section, One way FEM	FD pengeluaran dan rata-rata pengeluaran dan FD penerimaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. FD penerimaan dan otonomi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan.
Thiessen (2003)	Rata-rata untuk negara anggota OECD (dan negara berpendapatan menengah)	1973 -1998	Lintas negara, OLS	FD pengeluaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan ( <i>but not robust</i> ).
Thiessen (2003a)	21 negara maju	1981 - 1995	Panel data, GLS	FD pengeluaran dengan 10% mampu meningkatkan pertumbuhan GDP riil per kaita dengan 0.12% pada tingkat signifikansi 5 %
Behnisch (2003)	Jerman	1950 -1990	Analisis Time Series	Hubungan antara FD pengeluaran dan pertumbuhan adalah negatif dan signifikan.

<b>Studi</b>	<b>Negara</b>	<b>Periode</b>	<b>Metode</b>	<b>Temuan utama</b>
Desai (2003)	Rusia (80 region)	1996 - 1999	OLS dan TSLS	Tax retention memiliki pengaruh yang positif terhadap output recovery akumulatif dari regions.
Enikolopov dan Zhuravskaya (2003)	21 negara maju dan 70 negara berkembang dan transisi	1975 - 2000	OLS, 2SLS	FD penerimaan meningkat 10% akan menurunkan pertumbuhan GDP riil per kapita di negara-negara berkembang dengan 0.15% pada tingkat signifikansi 5%. Kuadrat dari FD penerimaan akan berdampak negatif dan signifikan.
Eller (2004)	22 negara anggota OECD	1972 - 1996	FEM, Time Dummy	Desentralisasi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi
Feld, Baskaran dan Dede (2004)	19 negara anggota OECD	Data panel, 1973 -1998	FEM, Time Dummy	Tidak ada pengaruh yang kuat dari FD pengeluaran dan penerimaan.
Akai, Nishimura dan Sakata (2004)	USA (50 negara bagian)	1992 - 1997	Cross cross-sectional growth regression, dengan Maximum Likelihood estimation	Ditemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara FD dan pertumbuhan ekonomi, dan hubungan negatif antara FD dan volatilitas ekonomi
Iimi (2005)	51 negara	1997 - 2001	OLS	FD pengeluaran berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Bodman dan Ford (2006)	18 negara anggota OECD	Data cross-section 1996 dan data panel (1981 – 1998)	OLS	FD pengeluaran dan penerimaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Crion et al (2006)	17 autonomous communities	1980 – 1998 (FD Expenditure) dan 1994 - 1999 (FD Revenue)	Panel data, FEM	Proses desentralisasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi

<b>Studi</b>	<b>Negara</b>	<b>Periode</b>	<b>Metode</b>	<b>Temuan utama</b>
Martinez dan McNaab (2006)	66 negara maju dan berkembang	1972 - 2003	OLS, PCSC dan IV	Desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara berkembang, tetapi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara maju.
Thorton (2007)	19 negara anggota OECD	1980 - 2000	OLS	FD berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
Enikolopov dan Zhuravskaya (2007)	75 negara-negara berkembang dan transisi	1975 - 2000	OLS, 2SLS	FD penerimaan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang yang “baru” (young) dan berdampak positif pada negara-negara berkembang yang “lama” (old).
Baskaran dan Feld (2009)	23 negara-negara anggota OECD	1975 - 2001	Pooled OLS dan REM	Secara keseluruhan, FD penerimaan tidak berhubungan dengan economic outcomes.
Rodriguez dan Kroijer (2009)	16 negara-negara Eropa Tengah dan Timur	1990 - 2004	FEM	FD pengeluaran berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Awalnya FD penerimaan berdampak negatif terhadap pertumbuhan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu FD penerimaan tersebut juga pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan.
Rodriguez dan Ezcurra (2010)	Negara-negara anggota OECD	1990 – 2005	OLS	Desentralisasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bodman (2011)	Negara-negara anggota OECD	1981 - 1998	OLS	FD penerimaan dan pengeluaran tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Studi	Negara	Periode	Metode	Temuan utama
Buser (2011)	Negara-negara OECD berpendapatan tinggi	1972 - 2005	Regresi Data Panel	FD penerimaan dan pengeluaran pada tingkat sub nasional berdampak positif terhadap tingkat pendapatan.
Bodman (2013)	Negara-negara anggota OECD	1981 - 1998	Panel Data Regression	Tidak cukup bukti bahwa FD memiliki hubungan yang langsung dengan pertumbuhan ekonomi.
Baskaran dan Feld (2013)	Negara-negara anggota OECD	1975 - 2008	FEM model dan OLS	FD penerimaan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Gummel et al (2013)	Negara-negara anggota OECD	1972 - 2005	PMG dan IV regression	FD pengeluaran berdampak menghambat ( <i>retard</i> ) per-tumbuhan ekonomi, sementara FD penerimaan berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Yushkov (2015)	Rusia	2005 - 2012		FD penerimaan berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan eko-nomi regional
Hasanov, et al (2016)	Azerbaijan	2002 - 2013	Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach	FD berdampak negatif terhadap pertumbuhan GDP riil di Azerbaijan.
Miri, et al (2017)	Marocco (16 region)	2003 - 2014	Pendekatan Panel Cointegration	Dalam jangka pendek, FD di Maroko berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Slavinskaite (2017)	21 negara Eropa terpilih	2005 - 2014	FEM	FD berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber.

Khusus untuk kasus Indonesia, penelitian tentang desentralisasi fiskal yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah telah dilakukan antara lain oleh Swasono (2007) dan Suwanan dan Sulistiani (2009), dan Resosudarmo, et al (2009). Swasono (2007) menemukan bahwa desentralisasi fiskal terutama desentralisasi dari sisi pengeluaran (*expenditure decentralization*) yang diukur dengan rasio pengeluaran (*expenditure ratio*) ternyata berdampak negatif terhadap



pertumbuhan ekonomi. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Resosudarmo et al (2009), menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal berdampak mengurangi kesenjangan antar perekonomian daerah dan hal ini pada gilirannya memper-cepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Studi lainnya dilakukan oleh Junaidi, et al (2013) di Jawa Timur, di mana mereka menggunakan pendekatan SEM dan mereka menemukan bahwa desentralisasi fiskal (di-ukur dengan menggunakan rasio pengeluaran langsung dan tidak langsung terhadap dana perimbangan seperti DAU, DAK dan DBH) berdampak positif dan signifikan terhadap per-tumbuhan ekonomi lokal (*local economic growth*). Penelitian yang dilakukan oleh Hendri (2015) di Sumatera Utara dengan menggunakan model regresi data panel yang diestimasi dengan metode OLS, FEM dan REM menemukan bahwa desentralisasi fiskal ternyata ber-dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi ter-sebut. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Nurhemi dan Suryani (2017) menemu-kan bahwa otonomi keuangan daerah (*regional financial autonomy*) yang direpresentasikan oleh derajat desentralisasi fiskal berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data *time series* (1985 – 2014). Adapun data yang diperlukan dalam studi ini adalah pertumbuhan ekonomi (1985 – 2014), pengeluaran pemerintah baik berbagai tingkat (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk kurun waktu 1985-2014, dan tingkat inflasi (1985-2014). Sumber data adalah (1) Statistik Indonesia (berbagai tahun), Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi (berbagai tahun), Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota (berbagai tahun) dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Perekonomian Indonesia (berbagai tahun) dari Bank Indonesia.

### Model Analisis dan Metode Estimasi

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (*multiple regression model*) dan diestimasi dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Model regresinya dirumuskan sebagai berikut:

$$ECGR = \alpha_0 + \alpha_1 FD_K + \alpha_2 FD_{KSQ} + \alpha_3 FD_P + \alpha_4 FD_{PSQ} + \alpha_5 INF + e \dots \dots \dots [1]$$

dimana:

ECGR = laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan di dalam PDBriil atau harga konstan

FD<sub>K</sub> = desentralisasi fiskal yang diproksi dengan share pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota terhadap total pengeluaran pemerintah (kabupaten dan kota + provinsi + pusat) (dalam persen)

FD<sub>KSQ</sub> = kuadrat dari FD<sub>K</sub> (dalam persen)

FD<sub>P</sub> = desentralisasi fiskal diproksi dengan menggunakan share pengeluaran pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah (pengeluaran pemerintah kabu-paten dan kota + provinsi + pusat) (dalam persen)

FD<sub>PSQ</sub> = kuadrat dari FD<sub>P</sub> (dalam persen)

INF = tingkat inflasi (dalam persen)

e = error term

### Hipotesis dan Asumsi

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah., dimana  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6 > 0$ . Asumsi yang digunakan adalah bahwa pengeluaran pemerintah daerah tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang memiliki dampak,



baik langsung (*direct effect*) maupun tidak langsung (*indirect effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa ketiga peubah bebas yang digunakan yaitu desentralisasi fiskal yang proksi dengan share pengeluaran kabupaten dan kota terhadap total penge-luaran pemerintah ( $FD_K$ ) dan kuadrat dari  $FD_K$  ( $FD_{KSq}$ ) dan desentralisasi fiskal yang diproksi dengan share pengeluaran pemerintah Provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah ( $FD_P$ ) dan kuadrat dari  $FD_P$  ( $FD_{PSq}$ ) dan tingkat inflasi (INF) semuanya menunjukkan berper-ngaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

Dengan tanda yang positif pada peubah  $FD_K$  dan  $FD_P$  menunjukkan bahwa pada awalnya yaitu dalam jangka pendek desentralisasi fiskal baik pada aras kabupaten dan kota maupun pada aras provinsi cenderung untuk berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal akan mendorong per-tumbuhan ekonomi daerah juga semakin meningkat. Namun, dalam jangka panjang ter-nyata desentralisasi fiskal tersebut baik pada aras kabupaten/kota maupun provinsi ternyata cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian dimana koefisien regresi untuk peubah kuadrat  $FD_K$  (atau  $FD_{KSq}$ ) dan kuadrat  $FD_P$  (atau  $FD_{PSq}$ ) memiliki tanda yang negatif.

Adapun peubah tingkat inflasi (INF) yang digunakan sebagai peubah kontrol, ter-nyata juga berdampak negatif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Peubah desentralisasi fiskal baik untuk tingkat kabupaten maupun provinsi semuanya berpengaruh nyata secara statistik pada tingkat signifikansi 5 persen; sedangkan peubah tingkat inflasi berpengaruh nyata secara statistik pada tingkat signifikansi 10 persen. Hasil selengkapnya dapat disimak dalam Tabel 4.1.berikut.

Tabel 4.1. Hasil Estimasi Model Desentralisasi Fiskal:  
Peubah Dependen Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Peubah	Koefisien	t- test	Signifikansi
Intercept	-27.55411	-5.532552	0.0000
$FD_K$	0.851832	3.9551768	0.0006
$FD_{KSq}$	-0.024802	-4.142501	0.0004
$FD_P$	5.653055	5.442134	0.0000
$FD_{PSq}$	-0.272935	-4.594790	0.0001
INF	-0.055206	-1.744133	0.0930
Adj. R <sup>2</sup>		0.910596	
F test		60.07423	
DW statistic		1.983414	
N		30	

Sumber: Lampiran 1 (Hasil Olahan)

Secara bersama-sama kelima peubah bebas tersebut mampu menjelaskan 91.06 persen variasi dari peubah tingkat pertumbuhan ekonomi. Artinya, model ini cukup bagus dan elegan untuk digunakan dalam melakukan prediksi (*prediction*) atau peramalan (*fore-casting*).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi model dan pembahasannya yang telah dikemukakan sebelumnya, selanjutnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, desentralisasi fiskal baik diukur dengan rasio pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota terhadap tola pengeluaran pemerintah maupun rasio pengeluaran pemerintah Provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah, dalam jangka pendek cende-rung berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.



*Kedua*, namun demikian, dalam jangka panjang desentralisasi fiskal di Indonesia ternyata cenderung berdampak negatif dan juga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, baik itu diukur dengan rasio pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota terhadap total pengeluaran pemerintah maupun diukur dengan rasio pengeluaran pemerintah terhadap total pengeluaran pemerintah.

*Ketiga*, peubah tingkat inflasi yang digunakan sebagai peubah kontrol dalam model ini memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

*Keempat*, secara bersama-sama ketiga peubah independen yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan dengan baik variasi yang terjadi pada peubah pertumbuhan ekonomi regional, sehingga dapat dikatakan bahwa model ini cukup bagus untuk digunakan dalam membuat prediksi tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di masa-masa yang akan datang.

### Implikasi Kebijakan

Sejalan dengan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa implikasi kebijakan sebagai berikut:

*Pertama*, pengelolaan kebijakan desentralisasi fiskal terutama dalam jangka panjang perlu lebih serius dan dilakukan secara berhati-hati karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi regional cenderung negatif. Artinya, kebijakan desentralisasi fiskal tersebut perlu diikuti dengan kebijakan lain untuk dapat menyalurkan dampak negatif dari desentralisasi fiskal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber-daya manusia (SDM) daerah dan penguatan kelembagaan pemerintah di daerah perlu dilakukan dan lebih ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang. Hal ini penting mengingat basis otonomi daerah berada di daerah terutama kabupaten dan kota.

*Kedua*, perlu lanjutan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal perlu dilakukan dengan menggunakan data dan model analisis yang berbeda, misalnya menggunakan data panel dengan model analisis regresi data panel.

*Ketiga*, faktor stabilitas makroekonomi ekonomi perlu mendapatkan perhatian karena ternyata peubah tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

### REFERENSI

- Akai, N., Y. Nishimura, and M. Sakata (2004), “Fiscal Decentralization, Economic Growth and Economic Volatility-Theory and Evidence from State-level Cross section Data for the United States”, Discussion Paper Series, no. 03-F-2, The Center for International Trade Studies, Faculty of Economics , Yokohama National University.
- Bahl, R. and J. F Linn.(1992) “Urban Public Finance in Developing Countries,” New York, Oxford University Press.
- Behnisch, A’, T. Buettner and D. Stegarescu (2001), “Public Sector Centralization and Productivity Growth: A Long-term View on the German Experience”, Conference paper, 57<sup>th</sup> .Congress of the International Institute of Public Finance (HPF). A-Linz, August 27-30, 2001.
- Bird, R. M and C. Wallich, “Fiscal Decentralization and Intergovernmental Relations in Transition Economies: Towards a Systematic Framework of Analysis,” Country Economics Department Working Paper, World Bank, Washington, D.C. (1993).
- Davoodi, H., D. Xie and H. Zou, “Fiscal Decentralization and Economic Growth in United States,” Mimeo, Policy Research Department, World Bank (1995).
- Davoodi, H. and H. Zou (1998), “Fiscal Decentralization and Economic Growth – A Cross-Country Study”, Journal of Urban Economics, 43, 244- 57.
- Desai, R. M., L. M. Freinkman and I. Goldberg (2003), “Fiscal Federalism and Regional Growth, Evidence from the Russian federation in the 1990s”, World Bank Policy Research Working Paper no. 3138.

- Hendri (2015), "Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth in Sumatera Indonesia". Research Paper for Obtaining the Degree of Masters of Art in Development Economics. ISS The Hague, The Nederland.
- Jumadi, Pudjiharjo, Maski, and Kusaini (2013), "The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java". IOSR Journal of Humanities and Social Science(IOSR-JHSS), Volume 13, Issue 1 (jul-Aug), pp. 01-07.
- Lin, J. Y. and Z. Liu (2000), "Fiscal Decentralization and Economic Growth in China". Economic Development and Cultural Change, 49 (1), 1-23.
- Nanga, Muana dan Daulat H. Pohan (2017), Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Laporan Penelitian No. 008-LP/ORP/VI/2017. Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan, Karawaci Tangerang Banten.
- Nurhemi dan Suryani (2015), "Regional Financial Autonomy and the Economic Growth in Indonesia". Bulletin of Monetary, Economics and Banking, Volume 18, Number 2, October, pp. 171-192.
- Oates, W. E. (1995), "Comment on 'Conflict and Dilemmas of Decentralization' by Rudolf Hommes". In M. Bruno and B. Pleskovic, eds. Annual World Bank Conference on Developmentb Economics.
- Resosudarmo, B. P. et al (2009), "The Indonesian Interregional Social Accounting Matrix for Fiscal Decentralization Analysis". Journal of Indonesian Economy and Business, Vol. 24, Number 2, pp. 145-162.
- Sidik, Machfud (2007), A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons From Indonesia's Experience. Ripelge Jakarta.
- Simanjuntak, Robert A. (2010), "Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia". Prisma, Vo. 29, No. 3, Juli. LP3ES Jakarta
- Swasono, Fauziah (2007), "Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia". Economics and Finance, Vol. 55 (2), pp. 109-134.
- ThieBen, U. (2003), "Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries", Conference paper. 18<sup>th</sup>, Annual Congress of the European Economic Association (EEA), SE-Stockholm, August 20-24, 2003.
- Woeller, G. M., and K. Phillips (1998), "Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth: An Empirical Investigation", Journal of Development Studies, 34 (4), 139-48.
- Xie, D., H. Zou and H. Davoodi (1999), "Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States", Journal of Urban Economics, 45, 228 – 39.
- Yilmaz, S. (1999), "The Impact of Fiscal Decentralization on Macroeconomic Performance", National Tax Association, Preceedings of the 92<sup>nd</sup> , Annual Conference on Taxation, US- Atlanta, October 24-26, 1999, 251-260
- Zhang, T., and H. Zou (2001), "Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China", Journal of Public Economics, 67, 221- 40.